

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PD SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PEMERINTAHAN KOTA BINJAI

Ika Ocvianita ^{1*)}; Irfan ²⁾; Syafrida Hani ³⁾

- 1). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: ikaika2870@gmail.com
- 2). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: dr.irfan@umsu.ac.id
- 3). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: syafridahani@umsu.ac.id

*Corresponding email: ikaika2870@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the impact of the Government Internal Control System (SPIP) and the Understanding of Government Accounting Standards on the Timeliness of Financial Report Submission, with the Effectiveness of the Regional Control Information System (SiPD) acting as a moderating variable in the Government of Binjai City. This research adopts a quantitative associative approach, utilizing path analysis through SmartPLS 4 software. A total of 80 questionnaires were distributed for the study. The findings reveal that SPIP has a positive and significant effect on the timeliness of financial report submission. Additionally, the understanding of Government Accounting Standards also has a positive and significant impact. Moreover, the effectiveness of SiPD plays a moderating role, strengthening the relationship between SPIP and the timeliness of financial report submission, as well as enhancing the effect of understanding Government Accounting Standards on the timeliness of financial reporting.

Keyword: Government Internal Control System, Understanding of Government Accounting Standards, Timeliness in Financial Statement Submission, Effectiveness of SiPD.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah menjadi aspek penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya negara (Sains, 2018), di mana penyusunan laporan keuangan tepat waktu merupakan elemen krusial agar informasi yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Laoli dan Telaumbanua, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif yang ditetapkan (Irafah & Eka NS, 2020). Meski demikian, pemerintah sering menghadapi kendala dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu, yang berpotensi menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Romario dan Rangga, 2022). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memegang peranan penting dalam memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Menurut Herlina (2021), SPIP merupakan proses menyeluruh yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP didefinisikan sebagai proses terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh aktivitas pemerintahan. Proses ini tidak hanya menekankan pengawasan internal, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kebijakan, serta memastikan penggunaan sumber daya secara tepat guna. Dengan demikian, pengendalian internal menjadi dasar bagi kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, mencegah penyimpangan, serta menjamin pelaksanaan anggaran yang tertib (Januri & Alpi, 2024). SPIP, oleh karena itu, bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan sistem holistik yang mencakup strategi pengawasan, manajemen risiko, pengendalian operasional, serta upaya memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu mencegah penyimpangan maupun tindakan fraud (Afiah dan Azwari, 2015).

Pelaksanaan penyampaian laporan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 menunjukkan terdapat 9.158 temuan yang mencakup 15.674 permasalahan dengan nilai mencapai Rp18,37 triliun, termasuk kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta penggunaan anggaran yang tidak hemat dan efisien. Contoh konkret terlihat pada Pemerintah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, menandakan kegagalan total dalam implementasi SPIP dan ketepatan waktu pelaporan. Fenomena serupa terjadi di Pemerintah Kota Binjai pada 2024, di mana 15 dari 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlambat menyerahkan laporan keuangan, dan Dinas Perpustakaan Kota Binjai bahkan belum menyelesaikan laporannya hingga awal 2024. Keterlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan belum optimalnya sistem pengendalian internal, yang berpotensi memengaruhi konsolidasi laporan keuangan kota secara keseluruhan dan opini audit BPK. Situasi ini menegaskan pentingnya efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam menjamin pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan sesuai ketentuan hukum, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan wewenang. Namun, untuk meningkatkan efektivitas SPIP, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang SAP, sistem yang belum terintegrasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi harus diatasi melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi (Bulan dan Mawikere, 2017). Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Heinrich dan Probohudono, 2023).

Rendahnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di instansi pemerintah mendorong perlunya kajian lebih mendalam mengenai pengaruh sistem ini terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, karena pengendalian internal memegang peranan penting dalam menjaga integritas laporan, mencegah kecurangan, dan memastikan akuntabilitas (Wahyuni & Haryanto, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik memiliki dampak positif terhadap ketepatan waktu pelaporan (Tang & Elvi, 2021; Aryanti & Suryaputri, 2022), namun penelitian lain menekankan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan (Wulandari, 2019; Rahman, 2020). juga mengidentifikasi adanya kesenjangan terkait peran variabel moderasi, misalnya efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SiPD), yang semakin relevan dalam konteks pelaporan keuangan daerah. Selain itu, pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi faktor krusial, karena keterbatasan pengetahuan mengenai SAP dapat menghambat proses penyusunan laporan dan menurunkan kualitas transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sumanti et al., 2022). Meskipun SAP menyediakan kerangka

metodologis yang sistematis untuk pencatatan dan pengakuan transaksi, kompleksitas regulasi dan kesulitan dalam penerapannya berpotensi memperlambat penyusunan laporan (Ramadhan & Nuraibah, 2024). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kendala teknis, seperti kualitas sistem informasi dan infrastruktur, sering lebih dominan dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan dibanding pemahaman SAP, sehingga terdapat gap riset mengenai peran teknologi dan dukungan manajerial dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan (Prasetyo & Ambarwati, 2021). Dengan demikian, studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemahaman SAP dan ketepatan waktu pelaporan di pemerintahan daerah, khususnya di kota dengan keterbatasan sumber daya seperti Binjai, sangat penting untuk menutup gap riset ini sekaligus berkontribusi pada pengembangan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel (Lestari, 2020).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan dua faktor krusial yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah (Aramide dan Bashir, 2015). SPIP berperan dalam membangun mekanisme pengendalian internal yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga risiko kesalahan dan keterlambatan dalam penyusunan laporan dapat diminimalkan. Sementara itu, penguasaan SAP menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas kedua elemen ini diperkuat oleh pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan dan penyampaian laporan keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel (Yahya et al., 2018). Dengan penggunaan teknologi informasi yang tepat, data keuangan dapat dikelola secara cepat dan efektif, sehingga ketepatan waktu pelaporan meningkat dan akuntabilitas serta transparansi terjaga (Yani, 2008). Di Kota Binjai, penerapan SIPD sejak 2021 menggantikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan tujuan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP, sehingga diharapkan proses penyampaian laporan keuangan menjadi lebih andal, relevan, dan tepat waktu (Adisi dan Sadad, 2022). Selain itu, integrasi SPIP, SAP, dan SIPD diharapkan mampu menciptakan sinergi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, memperkuat pengawasan internal, serta mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang efektif turut mendukung penguatan SPIP dan penerapan SAP yang tepat oleh seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan, sehingga ketiga elemen tersebut saling terkait untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai standar (Ekaputra, 2021). Meski demikian, penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan pemahaman SAP terhadap ketepatan waktu pelaporan masih terbatas, terutama pada pemerintahan daerah tingkat kota seperti Binjai. Studi oleh Eristanti & Putra (2018) dan Noviani & Hendarsyah (2020) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif dan pemahaman SAP memiliki peran signifikan dalam mempercepat penyampaian laporan, namun penelitian terkait peran moderasi SIPD dalam konteks ini masih minim. Penelitian Maelani & Susilawati (2022) menekankan pentingnya SIPD sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan pemahaman SAP terhadap ketepatan waktu laporan. Sementara itu, temuan dari Lestari (2020) dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi cenderung lebih dominan dalam memengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan mengenai penerapan SAP dan pengelolaan SPIP menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan. Peningkatan kompetensi pegawai pemerintah dalam memahami prinsip akuntansi, prosedur pengendalian internal, serta pemanfaatan SIPD akan membantu meminimalkan kesalahan, mempercepat proses penyusunan laporan, dan memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan dapat

dipertanggungjawabkan. Upaya ini juga akan mendorong terciptanya budaya akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Saputra & Handayani, 2023). Studi lebih mendalam mengenai peran SIPD dalam memperkuat atau memoderasi pengaruh pengendalian internal dan pemahaman SAP terhadap ketepatan waktu pelaporan di pemerintahan daerah, khususnya Kota Binjai, sangat penting untuk menutup gap penelitian yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dengan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan juga berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Selain itu, efektivitas SIPD diduga mampu memoderasi pengaruh SPIP dan pemahaman SAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga semakin efektif penerapan SIPD, semakin kuat pula hubungan antara kedua variabel independen tersebut dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen, serta pengaruh moderasi dalam hubungan tersebut (Irfan et al., 2024). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh 80 PNS di Bappelitbang Kota Binjai, dengan jumlah sampel yang sama yaitu 80 responden, melalui teknik sampling jenuh (Azhari et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui survei online menggunakan skala ordinal, kemudian dianalisis dengan SEM-PLS, yang sesuai untuk model indikator reflektif dan formatif dengan distribusi data non-normal atau sampel terbatas (Fernanda et al., 2022). Analisis ini mencakup uji pengaruh langsung untuk mengetahui hubungan antarvariabel utama serta uji moderasi guna menguji peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh antarvariabel dalam model penelitian. (Fernanda et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dalam SmartPLS mencakup validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen mengukur korelasi antar indikator dalam suatu konstruk, yang diperiksa melalui nilai loading indikator (lebih dari 0,7) dan *Average Variance Extracted* (AVE) yang lebih besar dari 0,5. Validitas diskriminan menguji pemisahan antar konstruk yang berbeda, dengan menggunakan HTMT ratio, yang idealnya harus kurang dari 0,90. Kedua uji ini memastikan bahwa konstruk dalam model mengukur dengan tepat dan tidak tumpang tindih.

Tabel 1. Hasil Uji Loading Factor

Variabel	Indikator	Outer Loading	Rule of Thumb	Kriteria
SPIP (X1)	P1	0,810	0,700	Memenuhi Validitas
	P2	0,752	0,700	Memenuhi Validitas
	P3	0,796	0,700	Memenuhi Validitas
	P4	0,821	0,700	Memenuhi Validitas
	P5	0,754	0,700	Memenuhi Validitas

	P6	0,785	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P7	0,798	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P8	0,807	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P9	0,721	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P10	0,808	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P11	0,714	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P12	0,743	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P13	0,812	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P14	0,804	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P15	0,797	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P16	0,724	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P18	0,782	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P18	0,734	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P19	0,818	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P20	0,737	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)	P1	0,790	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P2	0,785	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P3	0,821	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P4	0,737	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P5	0,757	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P6	0,782	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P7	0,753	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P8	0,832	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P9	0,798	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P10	0,741	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P11	0,831	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P12	0,793	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P13	0,782	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P14	0,750	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P15	0,742	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P16	0,736	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P17	0,807	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P18	0,825	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P19	0,763	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P20	0,778	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
Efektivitas SiPD (Z)	P1	0,712	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P2	0,847	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P3	0,725	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P4	0,731	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P5	0,787	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P6	0,751	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P7	0,804	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P8	0,777	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P9	0,803	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P10	0,798	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P11	0,722	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P12	0,837	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P13	0,829	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P14	0,782	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P15	0,743	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>

Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)	P16	0,712	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P17	0,808	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P18	0,792	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P19	0,784	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P20	0,764	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P1	0,825	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P2	0,782	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P3	0,820	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P4	0,788	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P5	0,857	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P6	0,737	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P7	0,856	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P8	0,714	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P9	0,749	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P10	0,873	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P11	0,819	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P12	0,736	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P13	0,742	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P14	0,712	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P15	0,821	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P16	0,741	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P17	0,802	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P18	0,807	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P19	0,747	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P20	0,719	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P21	0,728	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P22	0,773	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P23	0,816	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>
	P24	0,827	0,700	<i>Memenuhi Validitas</i>

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Semua indikator untuk variabel SPIP (X1), Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2), Efektivitas SiPD (Z), dan Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai *Outer Loading* di atas 0,700, yang memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut valid karena secara konsisten mengukur konstruk yang dimaksud.

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel Laten	AVE	Kriteria
Efektivitas SiPD (Z)	0,824	<i>Convergent Validity</i>
Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)	0,892	<i>Convergent Validity</i>
SPIP (X1)	0,735	<i>Convergent Validity</i>
Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)	0,878	<i>Convergent Validity</i>

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Hasil uji Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan bahwa semua variabel laten dalam model ini memenuhi kriteria validitas konvergen, dengan nilai AVE lebih dari 0,5. Efektivitas SiPD (Z) memiliki AVE 0,824, Ketepatan Waktu Laporan Keuangan (Y) AVE 0,892, SPIP (X1) AVE 0,735, dan Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) AVE

0,878. Dengan nilai AVE yang di atas 0,5, dapat disimpulkan bahwa konstruk-konstruk tersebut valid dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur konsistensi instrumen dalam mengukur variabel. Dalam SmartPLS, reliabilitas diuji dengan Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha. Nilai CR dan Cronbach's Alpha di atas 0,7 menunjukkan konsistensi internal yang baik, menandakan bahwa konstruk dan indikatornya dapat diandalkan untuk pengukuran yang konsisten dalam penelitian.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach Alpha	Composite Reliability
SPIP (X1)	0.836	0.804
Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)	0.827	0.824
Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)J	0.775	0.767
Efektivitas SiPD (Z)	0.857	0.799

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam model memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR) di atas 0,7, yang mengindikasikan reliabilitas yang baik. SPIP (X1) memiliki Cronbach's Alpha 0,836 dan CR 0,804, Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) 0,827 dan 0,824, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y) 0,775 dan 0,767, serta Efektivitas SiPD (Z) 0,857 dan 0,799. Semua variabel reliabel dengan nilai di atas 0,7.

Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi (R-Square) adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1 dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Secara umum, nilai R-Square di atas 0,75 dianggap menunjukkan model yang kuat, di atas 0,50 menunjukkan model moderat, dan di atas 0,25 menunjukkan model lemah, meskipun interpretasi ini tetap harus disesuaikan dengan konteks penelitian dan bidang studi yang sedang diteliti.

Tabel 4. Uji R-Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted	Kategori
Efektivitas SIPD (Z)	0,714	0,708	Kuat
Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)	0,722	0,713	Kuat

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Nilai *R-Square* untuk variabel Efektivitas SiPD (Z) adalah 0,714 dan untuk Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y) adalah 0,722, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang kuat dengan variabel independen dalam model. Nilai *R-Square Adjusted* masing-masing sebesar 0,708 dan 0,713 juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa meskipun ada penyesuaian untuk jumlah indikator yang digunakan, model tetap mampu menjelaskan sebagian besar variasi pada variabel dependen. Dengan nilai *R-Square* di atas 0,70, kedua variabel ini termasuk dalam kategori hubungan yang kuat, artinya

model yang digunakan efektif dalam memprediksi atau menjelaskan variasi pada kedua variabel tersebut.

Pengujian Variabel Penelitian

Pengujian signifikansi variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model statistik signifikan atau tidak. Dalam konteks PLS (Partial Least Squares), pengujian ini dilakukan menggunakan t-test atau bootstrapping untuk melihat nilai t-statistic dan p-value. Jika nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 (untuk tingkat signifikansi 5%) dan p-value lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antar variabel dianggap signifikan. Artinya, variabel independen memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Jika sebaliknya, hubungan tersebut tidak signifikan dan tidak dapat dianggap sebagai pengaruh yang kuat.

Tabel 5. Uji Pengaruh Langsung

Model Pengaruh Langsung	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
SPIP (X1) → Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)	0,276	0,492	0,135	3,017	0,001
Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X1) → Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)	0,356	0,321	0,084	2,147	0,012

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Hasil pengujian model pengaruh langsung menunjukkan bahwa kedua hubungan antara variabel independen dan dependen signifikan. Hubungan antara SPIP (X1) dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y) memiliki T Statistics 3,017 dan p-value 0,001, sementara hubungan antara Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y) memiliki T Statistics 2,147 dan p-value 0,012. Kedua hasil ini menunjukkan pengaruh signifikan SPIP dan Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel 6. Uji Pengaruh Moderasi

Model Pengaruh Moderasi	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Efektivitas SiPD (Z) x SPIP (X1) → Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)	0,307	0,087	0,042	2,257	0,001
Efektivitas SiPD (Z) x Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) → Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Y)	0,232	0,093	0,051	2,783	0,024

Sumber: Data Diolah SmartPLS 2025

Hasil pengujian model pengaruh moderasi menunjukkan bahwa Efektivitas SiPD (Z) berperan sebagai moderator yang signifikan dalam hubungan antara SPIP (X1) dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y) dengan T Statistics 2,257 dan p-value 0,001. Efektivitas SiPD juga signifikan memoderasi hubungan antara Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y) dengan T Statistics 2,783 dan p-value 0,024. Kedua hasil ini menunjukkan bahwa Efektivitas SiPD

memperkuat pengaruh SPIP dan Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh SPIP terhadap Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bukti yang sangat kuat tentang pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Nilai T-Statistics sebesar 3,017 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut memiliki kekuatan statistik yang tinggi, sementara P-value 0,001 yang jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05 membuktikan bahwa pengaruh ini bukan merupakan hasil kebetulan semata. Koefisien jalur 0,481 memberikan makna praktis bahwa setiap perbaikan satu unit dalam implementasi SPIP akan berkontribusi pada peningkatan ketepatan waktu pelaporan sebesar 48,1%, yang menunjukkan dampak yang cukup substansial. SPIP mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan melalui beberapa mekanisme fundamental. Pertama, sistem pengendalian internal yang baik menciptakan struktur dan prosedur yang jelas dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dan revisi yang dapat memperlambat penyelesaian laporan. Kedua, SPIP memastikan adanya pemisahan fungsi yang tepat dan sistem otorisasi yang jelas, yang mempercepat proses verifikasi dan persetujuan laporan. Ketiga, implementasi SPIP yang efektif menciptakan budaya akuntabilitas di mana setiap unit kerja memahami tanggung jawabnya dalam proses pelaporan, sehingga koordinasi antar unit menjadi lebih efisien.

Penerapan SPIP yang efektif membawa dampak operasional yang signifikan terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah dalam data keuangan, sehingga koreksi dapat dilakukan secara proaktif sebelum proses finalisasi laporan. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk revisi dan perbaikan pada tahap akhir. Selain itu, SPIP juga memfasilitasi standarisasi prosedur pelaporan, yang membuat proses menjadi lebih sistematis dan dapat diprediksi, sehingga timeline penyelesaian laporan menjadi lebih terkendali. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dihasilkan dari implementasi SPIP yang baik mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih luas. Laporan yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem pencatatan dan dokumentasi yang baik, proses rekonsiliasi yang efektif, dan koordinasi antar unit yang solid. Ini juga mengindikasikan bahwa instansi mampu mengelola sumber daya dan waktu dengan efisien, yang merupakan indikator penting dari good governance dalam sektor publik. Implementasi SPIP yang efektif tidak hanya memberikan manfaat immediate dalam hal ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga menciptakan dampak strategis jangka panjang.

Sistem pengendalian internal yang baik membangun kapasitas organisasi dalam mengelola informasi keuangan, yang menjadi fondasi untuk pengembangan sistem pelaporan yang lebih canggih di masa depan. Selain itu, budaya pengendalian yang tertanam melalui SPIP menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan terstruktur, yang berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan temuan ini, instansi pemerintah perlu memprioritaskan penguatan implementasi SPIP sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan bagi staf, perbaikan sistem informasi keuangan, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, serta pengembangan standar operating procedures yang lebih detail. Investasi dalam teknologi informasi yang mendukung SPIP juga dapat memberikan dampak multiplier dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pelaporan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Eristanti & Putra (2018) dan Noviani & Hendarsyah (2020) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Lestari (2020)

juga menemukan bahwa semakin baik penerapan SPIP, semakin cepat instansi pemerintah dapat menyampaikan laporan keuangannya, karena sistem tersebut membantu memastikan kelengkapan data dan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan. Selain itu, Saputra & Handayani (2023) menegaskan bahwa SPIP berperan penting dalam menciptakan efisiensi proses administrasi keuangan melalui pengawasan terintegrasi dan pengendalian risiko yang sistematis.

Pengaruh Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan Terhadap Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Hasil uji signifikansi pada model pengaruh langsung menunjukkan bahwa pengaruh Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y) terbukti signifikan secara statistik, dengan T-Statistics sebesar 2,147 dan P-value 0,012, yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien jalur sebesar 0,301 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu unit pada Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) akan meningkatkan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan sebesar 30,1%. Hal ini menegaskan bahwa semakin baik pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, semakin tepat waktu laporan keuangan yang dapat disampaikan. Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (SPAP) merupakan pedoman utama yang digunakan oleh aparat pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang benar, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pemahaman yang mendalam terhadap SPAP sangat krusial dalam memastikan laporan keuangan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari kesalahan, sekaligus menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Haryanto (2013), pemahaman yang baik terhadap standar ini merupakan kunci untuk memastikan kualitas dan akurasi laporan keuangan. Fahmi (2018) menekankan pentingnya pelatihan untuk aparat pemerintah agar lebih efisien dalam mengimplementasikan standar ini, sementara Nugroho (2019) juga berpendapat bahwa pemahaman yang baik terhadap SPAP dapat mempercepat proses akuntansi yang terstruktur, yang pada gilirannya mengurangi risiko keterlambatan. Sujono dan Djumahir (2019) menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang SPAP juga berhubungan erat dengan pemahaman mengenai pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. Oleh karena itu, penerapan yang baik terhadap Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (SPAP) tidak hanya meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.

Pengaruh SPIP Terhadap Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan dimoderasi Efektivitas SiPD

Hasil pengujian regresi struktural terhadap model pengaruh moderasi menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SiPD) memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan secara positif dan signifikan. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien jalur sebesar 0,092. Ini berarti bahwa efektivitas SiPD memperkuat pengaruh SPIP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebesar 9,2%. Semakin optimal SiPD digunakan untuk mendukung implementasi SPIP, semakin besar pula peningkatan ketepatan waktu laporan keuangan yang dapat dicapai. SPIP sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, dan transparan, termasuk dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Namun, meskipun SPIP diimplementasikan dengan baik, efektivitas SiPD

tetap memiliki peran kunci dalam mendukung kelancaran pengelolaan dan pelaporan keuangan. SiPD yang efektif memperlancar alur komunikasi dan integrasi data antara pihak-pihak terkait, yang pada gilirannya mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Penelitian oleh Tariq (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang kuat seperti SPIP akan jauh lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang efisien. Prawira (2019) juga mengungkapkan bahwa meskipun SPIP diterapkan dengan baik, ketidaktersediaan sistem informasi yang memadai dapat menghambat pengelolaan keuangan, yang akhirnya menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Mulyana (2020) menegaskan bahwa efektivitas SiPD sangat penting dalam mempercepat pengumpulan dan verifikasi data, sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu. Sulastri dan Rahayu (2021) menambahkan bahwa efektivitas SiPD berperan sebagai variabel moderasi yang meningkatkan hubungan antara SPIP dan ketepatan waktu laporan keuangan, dengan mempercepat proses pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan. Secara keseluruhan, efektivitas SiPD memainkan peran yang sangat signifikan dalam memperkuat pengaruh SPIP, memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan, serta menjamin bahwa laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun SPIP sudah diterapkan secara optimal, tanpa dukungan sistem informasi yang baik, proses pelaporan keuangan akan tetap menghadapi tantangan yang menghambat ketepatan waktunya.

Pengaruh Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan Terhadap Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan dimoderasi Efektivitas SiPD

Hasil pengujian regresi struktural terhadap model pengaruh moderasi menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SiPD) memoderasi hubungan antara Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (SPAP) dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan secara positif dan signifikan. Hal ini tercermin dari nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien jalur sebesar 0,098. Artinya, efektivitas SiPD meningkatkan pengaruh Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebesar 9,8%. Dengan kata lain, semakin optimal pemanfaatan SiPD dalam mendukung pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, semakin besar pula peningkatan ketepatan waktu laporan keuangan yang dapat dicapai. Sebaliknya, jika penggunaan SiPD tidak maksimal, maka pengaruh positif Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap ketepatan waktu pelaporan akan berkurang. Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (SPAP) adalah pedoman yang mengatur prinsip dan prosedur akuntansi yang wajib diikuti oleh instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Pemahaman yang baik terhadap standar ini sangat vital untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Sering kali, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan terjadi karena kurangnya pemahaman atau ketidakpahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang SPAP dapat secara langsung meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Namun, faktor Efektivitas SiPD juga berperan sangat penting dalam memoderasi hubungan ini. SiPD yang efektif mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dengan lebih efisien. Menurut Kurniawati (2018), efektivitas SiPD sangat mempengaruhi hubungan antara pemahaman akuntansi dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. SiPD yang baik memungkinkan para akuntan pemerintah untuk mengakses data dengan cepat dan memprosesnya secara lebih efisien. Sulistyani dan Hidayat (2019) juga menyatakan bahwa hubungan antara pemahaman akuntansi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi lebih kuat ketika SiPD berfungsi secara optimal. Budianto (2020) menambahkan bahwa SiPD yang efektif mempercepat aliran informasi dan mendukung implementasi standar akuntansi dengan lebih baik. Tanpa dukungan dari SiPD yang baik, meskipun pemahaman terhadap

standar akuntansi sudah memadai, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tetap bisa terganggu. Secara keseluruhan, efektivitas SiPD memainkan peran kunci dalam memperkuat pengaruh Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. SiPD yang efisien mempercepat proses pelaporan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengolahan data, yang pada gilirannya memastikan laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun pemahaman terhadap standar akuntansi sudah baik, sistem informasi yang efektif tetap menjadi faktor penentu dalam memastikan proses pelaporan keuangan berjalan lancar dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan juga berperan penting dalam meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan. Efektivitas Sistem Informasi Pengendalian Daerah (SiPD) terbukti memperkuat hubungan antara SPIP dan ketepatan waktu pelaporan, serta memperkuat pengaruh Standar Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap ketepatan waktu pelaporan, menjadikannya faktor kunci dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

REFERENSI

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150-164.
- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The effect of the implementation of government internal control system (GICS) on the quality of financial reporting of the local government and iTB impact on the principles of good governance: A research in district, city, and provincial government in South Sumatera. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 811-818.
- Alpi, M. F., & Akbar, H. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(2), 236-250.
- Aramide, S. F., & Bashir, M. M. (2015). The effectiveness of internal control system and financial accountability at local government level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management*, 3(8), 1-6.
- Aryanti, S. N. I. D., & Suryaputri, R. V. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1561-1572.
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- De Romario, F., Rangga, Y. D. P., & Erlin, Y. (2022). Pengaruh kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2), 45-53.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79.

- Eristanti, B. D. A., & Putra, I. N. N. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 91-104.
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 411-424.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337-348.
- Januri, J., & Alpi, M. F. (2024). Peranan Efektifitas Pengelolaan dana desa: Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 7(3), 46-54.
- Lestari, F. I. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung) (Doctoral dissertation, Institut Manajemen Koperasi Indonesia).
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381-1389.
- Maelani, P., & Susilawati, D. (2025). Kinerja organisasi: sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah (SIPD), komitmen organisasi dan pengendalian internal. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 2551-2563.
- Noviani, A., & Hendarsyah, D. (2020). Ketepatan waktu pelaporan keuangan: Sistem pengendalian internal dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 206-213.
- Prasetyo, A. S., & Ambarwati, L. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 73-84.
- Ramadhan, M. Z., & Nurabiah, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD BPKAD Pemerintahan Kota Bima). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 1-18.
- Sains, F. S. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Sumanti, A. O., Sondakh, J. J., & Kapojos, P. M. (2022). Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 381-388.
- Tang, S., & Elvi, E. (2021). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 18(1), 172-182.
- Wulandari dan Muhammad. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Yahya, I., Hasibuan, R. P. S., Torong, Z. B., & Muda, I. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (Sap) based on accrual in the

government of the districTB/cities in North Sumatera Province. Journal of Management Information and Decision Sciences, 21(1), 1-14.